



MANAJEMEN STRATEGI PESANTREN DALAM PENDIDIKAN BERBASIS TRANSFORMASI BUDAYA DAN POLITIK

SITI SRI ISTIQAMAH

STITI Lombok Utara

sitisri.istiqaamah@gmail.com

Abstract

Education is one element that plays a very strategic role in the development of a family, community, and nation. The progress and retreat of a nation can be seen from the development and quality of education. The more focused the implementation of education will lead a nation to a more advanced civilization. Every educational institution, both large and small educational institutions, must have various goals to be achieved, and these goals require a regulatory process through management. Islamic boarding schools as places of education and teaching consisting of several groups of people such as kyai or master teachers as leaders or caregivers, boarding school administrators, and students are a unit involved in carrying out educational activities. The presence of madrasas / Islamic boarding schools and other institutions in carrying out transformation-based education in the boarding school environment as an effort to continue the development of science and knowledge and technology certainly requires management or management which will eventually become an educational system of Islamic boarding school education, because management is basically contains three meanings. First, management as a process, second, management as a collectivity of people who carry out management activities, third, management as an art and science.

Keyword : Management, pesantren, education, culture and politics

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang berperan sangat strategis dalam pembinaan suatu keluarga, masyarakat, dan bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa dapat dilihat dari perkembangan dan kualitas pendidikannya Semakin



terarah penyelenggaraan pendidikan akan mengantarkan suatu bangsa ke peradaban yang lebih maju. Setiap lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan besar maupun kecil pasti mempunyai berbagai tujuan yang hendak dicapai, dan tujuan tersebut memerlukan proses pengaturan melalui manajemen. Pondok pesantren sebagai tempat pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari beberapa kumpulan orang seperti kyai atau tuan guru sebagai pimpinan atau pengasuh, pengurus pondok pesantren, dan para santri merupakan satu kesatuan yang terlibat dalam melakukan aktivitas Pendidikan. Kehadiran madrasah/pesantren dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan pendidikan berbasis transformasi di lingkungan pondok pesantren sebagai usaha untuk melanjutkan perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi tentunya membutuhkan pengelolaan atau manajemen yang pada akhirnya akan menjadi suatu sistem pendidikan dari pendidikan pondok pesantren, sebab manajemen pada dasarnya mengandung tiga pengertian. Pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan ilmu.

Kata Kunci : *Manajemen, pesantren, pendidikan, budaya dan politik*

A. Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan basis pendidikan dan sebagai tempat pendidikan yang setiap tahunnya semakin diminati dan digandrungi oleh masyarakat, para orang tua menyekolahkan dan memilih sebagai tempat pendidikan anak-anaknya di pondok pesantren dengan harapan anak-anaknya paham tentang agama Islam dan dapat melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik dan benar.

Lembaga pendidikan di pondok pesantren bukan hanya merupakan lembaga pembelajaran saja, akan tetapi pondok pesantren sebagai penyedia sarana pendidikan tempat melatih dan mendidik generasi calon pemimpin masyarakat dan bangsa sebab berapa



banyak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh bangsa yang lahir dan muncul dari latar belakang pendidikan di pondok pesantren, bahkan banyak juga tokoh-tokoh politik yang mempunyai latar belakang pendidikan dari pondok pesantren. Oleh sebab itu penting bagi pondok untuk menerapkan manajemen strategi pendidikan.

Mengurus pondok pesantren bukan hal yang ringan akan tetapi merupakan hal yang berat sehingga dalam mengelola pondok pesantren diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Keberlangsungan pendidikan di pondok pesantren tidak bisa disandarkan pada tokoh sentralnya saja seperti menyandarkan seluruh pekerjaan ke kyai atau tuan guru. Untuk mencapai kemajuan dalam pendidikan di pondok pesantren, maka pondok pesantren harus memiliki manajemen strategi sumber daya manusia di bidang pendidikan sehingga pondok pesantren tersebut tidak kaku dalam menjalankan roda pendidikan dan pengajaran dan mampu berdaya saing dengan pondok pesantren lainnya, setidaknya dengan manajemen dan strategi yang lengkap dan terperinci tersebut, bisa menjadi kerangka acuan dalam kelangsungan pendidikan di masa berikutnya, Dengan kata lain manajemen pendidikan merupakan usaha manusia melalui kerjasama untuk mengatur manusia yang lain dalam mencapai tujuan pendidikan.¹

¹ Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan*, (Bandung: Falah Production, 2004), h 17

Secara sederhana manajemen dapat dipahami sebagai segala aktivitas atau proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang di rencanakan. Dalam aktivitas tersebut terdapat subjek atau pelaku yang dikenal dengan manajer. Dengan demikian manajer adalah seorang (personal) ataupun orang-orang (people) yang melakukan aktivitas.²

Pembahasan awal dari artikel ini akan mengulas hubungan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia, pembahasan berikutnya akan menitikberatkan pada proses dinamika pondok pesantren dalam menghadapi transformasi sosial, budaya dan politik.

B. Pondok Pesantren Dan Manajemen Strategi Pendidikan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

Pada awalnya pesantren memang didirikan untuk pengajaran agama Islam, karena itu tidak terlalu salah jika sebagian orang di luar pesantren memandang pesantren sebagai tempat pengajaran agama Islam. Pesantren sejatinya telah lama banyak berubah. Jika dulu pesantren hanya mengajarkan kitab kuning kini kurikulum pesantren telah mengadopsi kurikulum madrasah, banyak juga pesantren yang mengadopsi kurikulum pesantren, bahkan banyak pesantren yang menyusun kurikulumnya sendiri dengan menggabungkan antara kurikulum madrasah dan pesantren sekaligus. Itu berarti bahwa pesantren kini telah mengajarkan ilmu- ilmu

² Muhammad Iwan Fitriani, Manajemen Pendidikan Islam (geneologi, paradigma dan model alternatif pengembangannya),(Mataram : Sanabila, 2015), h 12,13

umum seperti matematika, sains, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan dan lain sebagainya sebagaimana layaknya institusi pendidikan madrasah atau pesantren ³

Perbaikan pengelolaan manajemen pendidikan diarahkan untuk lebih memberdayakan pesantren sebagai unit pelaksana terdepan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dimaksudkan agar pesantren lebih mandiri dan bersikap kreatif, dapat mengembangkan iklim kompetitif antar pesantren di wilayahnya, serta bertanggung jawab terhadap stakeholder pendidikan, khususnya orang tua dan masyarakat, yang di era otonomi ini menjadi komite atau dewan pesantren (school council). Dalam pelaksanaannya, manajemen pendidikan harus lebih terbuka, accountable (dapat memper-tanggung jawabkan semua program kegiatannya), mengoptimalkan partisipasi orang tua dan masyarakat, serta dapat mengelola semua sumber daya yang tersedia di pesantren dan lingkungannya untuk digunakan seluas-luasnya bagi peningkatan prestasi siswa dan mutu pendidikan umumnya.⁴

Berangkat dari kenyataan tersebut, bagi Parsons, kekuatan (tepatnya power) adalah sebuah *alat sirkulasi (circulating medium)* dalam subsistem politik dari sistem masyarakat ataupun negara, dengan melakukan kemampuan bersama untuk memenuhi kinerja kewajiban yang mengikat (*building obligation*) dengan merujuk pada tujuan

³. Fuad Hasan, “Kebudayaan, Teknologi dan Teknokrasi” dalam Agus R Harjono, *Pembebasan Budaya-Budaya Kita*, (Jakarta: Gramedia, 1999) h. 151

⁴. Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, (Jakarta: LP3ES, 1993), h, 192



kolektif.⁵ Realitas berbicara bahwa negara seringkali menjadikan kekuatan tersebut sebagai alat legitimasi dan justifikasi dalam tujuan-tujuan kolektif dengan memberikan kenyataan-kenyataan semu yang seringkali disandarkan pada jargon-jargon sosial kemasyarakatan. Manajemen dan strategi dalam pendidikan yang disandarkan pada upaya-upaya untuk memajukan pendidikan dan tidak bisa dilepaskan dari kenyataan dan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan, oleh karena itu diperlukan adanya reformulasi demi kemajuan pendidikan.⁶ Bagi Soros, rekonstruksi dibidang pendidikan merupakan gagasan sekunder, sedangkan gagasan utama (primer) adalah pemahaman masyarakat secara terbuka (open society) dalam memajukan dunia pendidikan.⁷

Dalam konteks ini pemberdayaan merupakan upaya kolektif dari berbagai pihak, mulai pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, maupun tokoh dan masyarakat lokal. Pada titik ini, pemberdayaan merupakan kerja kolektif dengan partisipasi semua elemen masyarakat dengan memberikan keleluasaan bagi masyarakat menjawab dan mengklasifikasikan persoalan dan kebutuhan mereka dengan berbagai pendampingan yang berprinsip kesetaraan, kesamaan, dan keadilan. Dengan bahasa yang sama pemberdayaan dimaknai sebagai :

⁵ ibid, h 196

⁶ George Soros, *Open Society: Reforming Global Capitalism*, (Jakarta: Gemilang Raya, 2006)

⁷ Dawam Raharjo, "Pengantar Edisi Indonesia: Krisis Kapitalisme Global: Ilusi atau Realitas" dalam George Soros, *Open Society...* h. ix



*“... psychological state, a sense of competence, control, and entitlement that allows people to pursue concrete activities aimed at becoming powerful. Empowering members constitutes the work of the organization in its internal environment.”*⁸

Dalam pemberdayaan ini diperlukan adanya berbagai model, dalam konteks ini bahwa *“but their success is still dependent on the responsiveness of politicians.”*⁹ Oleh karena itu ada hubungan yang sinergis antara pesantren sebagai basis pemberdayaan masyarakat (modal sosial). Selama ini, tingginya dominasi pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan sampai ke tingkat operasional dinilai tidak kondusif bagi pertumbuhan dan peran serta dan partisipasi masyarakat. Secara historis, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan di tanah air sebenarnya sangat besar, tetapi strategi pemerintah dalam pembangunan pendidikan selama ini belum mampu menggali potensi tersebut, bahkan dalam beberapa kasus mematikannya.¹⁰

Nilai tradisionalisme tidak hanya dapat dilihat dari kultur dan kurikulum yang diterapkan diberbagai pesantren di Lombok, oleh sebab itu modernisasi sistem pendidikan di pondok pesantren melalui manajemen strategi pendidikan sangat di butuhkan, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan harus mampu maju, alumni pondok pesanten selalu menjadi sumber rujukan dalam ilmu-ilmu agama.

⁸Jacqueline B Mondros dan Scott M Wilson, 1994, *Organizing for Power...* khususnya pembahasan Bab 10: The Pursuit of Empowerment Strengths and Challenges of Practice.

⁹ Ibid, h. 242

¹⁰ Ibid, h. 233-241

Pada era modern sekarang ini agama kembali mengalami masa kebangkitan. Kebangkitan agama-agama besar dunia terjadi justru ketika agama diprediksi akan mengalami kemunduran dan kehilangan perannya. Bahkan Masyarakat dunia kini beramai-ramai mencari tambatan hati kepada agama, fenomena ini terjadi karena kegersangan yang melanda sebagian besar masyarakat, kecanggihan teknologi modern yang mempermudah kebutuhan hidup manusia rupanya tidak cukup memenuhi sisi kosong dalam diri manusia, sisi kosong itu adalah tarikan kebutuhan rohani, agama menjadi pilihan untuk mengisi sisi kosong kebutuhan rohani tersebut.¹¹ Sehingga pondok pesantren merupakan sentral pendidikan agama di Indonesia setiap tahun selalu mengalami perkembangan kuantitas jumlah santrinya dan kualitas dalam bidang pendidikan

Tradisionalisme yang berakar pada nilai-nilai kebiasaan turun temurun di pondok pesantren, dengan mengedepankan berbagai kitab maupun buku diajarkan dalam proses belajar dalam sistem kelas, maupun pada pengajian-pengajian di pondok pesantren untuk mengatasi hal tersebut, pengembangan model manajemen staretegi dalam dunia pendidikan berbasis pondok pesantren merupakan suatu hal yang penting, dan merupakan suatu upaya atau usaha untuk melakukan perubahan terhadap pengelolaan pendidikan di pondok pesantren tersebut. Manajemen berbasis pondok pesantren dapat diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan

¹¹. Suprpto, *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara dari negosiasi, adaptasi hingga komodifikasi*, (Jakarta , Kencana 2020), h 1



yang menginginkan adanya perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik dengan memberikan kewenangan (otoritas) kepada pesantren untuk memberdayakan dirinya.

Manajemen berbasis pesantren pada prinsipnya menempatkan kewenangan yang bertumpu kepada pesantren dan masyarakat, menghindari format sentralisasi dan birokratisasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi manajemen pesantren. Suksesnya pembangunan nasional di masa akan datang antara lain akan ditentukan oleh pengembangan manajemen pembangunan di berbagai bidang pendidikan. Transformasi pendidikan, politik dan sosial yang begitu cepat meminta pengelolaan sumber daya manusia dengan strategi pengembangan kelembagaan dan kepemimpinan yang kondusif bagi tumbuhnya masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam pembangunan, sehingga dapat memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia dalam lingkungan sosial budaya. Arah pendekatan manajemen strategi di bidang pendidikan sudah jelas, dari sentralisasi yang berlebihan menuju kepada desentralisasi yang positif yang sentralistik, menurut pendapat beberapa ahli, berakar pada faktor-faktor sejarah dan budaya kita yang menghambat pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan serta sumber pengembangan kelembagaan serta pengelolaan.

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan dalam bentuk satuan pesantren yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan



keterampilan siswa untuk menyiapkan mereka sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang terampil, terdidik, dan profesional, serta mampu mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dilakukan pengelolaannya secara desentralisasi. Hal ini sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, apalagi pendidikan kejuruan umumnya di Indonesia telah dibangun oleh Pemerintah dengan fasilitas yang memadai.

Salah satu dasar pemikiran makro yang melandasi lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah adanya kebutuhan untuk menghadapi tantangan persaingan global. Dengan otonomi dan desentralisasi diharapkan masing-masing daerah, termasuk warga masyarakatnya, akan lebih terpacu untuk mengembangkan mutu sumber daya manusiannya agar mampu bersaing. Kemampuan bersaing tersebut amat ditentukan oleh pendidikan yang bermutu. Mutu yang dimaksud bukan hanya dapat memenuhi standar nasional, melainkan juga untuk memenuhi standar internasional agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain, selain mampu menjadi “Tuan” di negara sendiri.

Masyarakat menganggap bahwa nilai-nilai universal ke pesantren direduksi sebagai nilai individual. Pondok pesantren dengan identitas independensi dan visi kerakyatan kehilangan ruh. Visi untuk membebaskan masyarakat pedesaan dari kebodohan dan keterbelakangan serta kemiskinan tidak mampu dipertahankan.



Visi tersebut secara perlahan mulai tergerus dengan orientasi politik (kekuasaan) akibat krisis identitas dunia pesantren. Di samping itu, globalisasi yang menggerus elemen-elemen dasar dari pesantren menjadikan institusi ini semakin lemah (*powerless*) dan jauh dari kebutuhan masyarakat pedesaan. Pada titik, globalisasi yang memunculkan hedonisme dan kapitalisasi ekonomi menjadikan budaya transformatif dan reproduksi budaya yang diciptakan pesantren menjadi tumpul, karena pesantren tidak lagi sebagai agen produksi tunggal dari realitas sosial.

Samuel Bowels pernah melakukan analisis politik ekonomi pendidikan. Bagi Bowels bahwa pendidikan Amerika merupakan reproduksi terhadap sistem kapitalisme.¹² Jika Bowels melahirkan pesimisme dalam dunia pendidikan Barat ala Amerika, bagaimana dengan ideologi pendidikan pesantren di Indonesia.

Pemaknaan tradisionalisme seringkali dikaitkan dengan tradisi. Sebuah bagian dari kebudayaan, dimana segenap daya pikir, daya kreatif, dan daya efektif menyertai dan termaktub dalam tradisi. Tradisi diartikan sebagai kumpulan dari perilaku dan kebudayaan komunitas yang bermakna persebaran berbagai karakter, pemikiran, dan perilaku sebuah kelompok.¹³

¹² Mansour Fakih, "Ideologi dalam Pendidikan" dalam William F O'neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), h.11

¹³ Tatik Hidayati, *Pendidikan dalam Perspektif Islam Tradisional Seyyed Hossein Nasr: Telaah Kritis terhadap Tujuan dan Kurikulum Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tesis PPS UIN Sunan Kalijaga, 2002) Bab III

Pada ideologi transendental berkaitan dengan perasaan socio-spatial dengan persoalan ontologis dan fenomenologis di sisi lain.

*"... the world religions were transcendent, not in the sense that they divided the cosmos into mundane and otherworldly spheres, but rather insofar as their power networks encompassed and cross-cut political and economic ones, such as empires or classes. Immanence is also used in a strictly sociological sense. Immanent ideological power refers to the solidarity or morale of a specific social group. An example would be the sense of identity and purpose which members of the working class have derived from socialist ideology."*¹⁴

Solidaritas dan moral menjadi bagian dari ideologi tradisionalisme pesantren yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Sebagai bagian dari ideologi pendidikan tradisionalisme merupakan penggerak dalam organisasi pembelajaran, dimana ia akan berpengaruh terhadap jalannya sebuah organisasi.¹⁵ Dalam konteks ini, bagi Mondros bahwa ideologi menjadi penting sebagai penggerak dan arah (guide) bagi sebuah organisasi sosial. Ia dapat eksklusif dan inklusif dalam memahami realitas sosial.

Dalam dua dekade terakhir dunia pesantren tengah bergejolak antara ideologi tradisionalisme dan kapitalisme. Di dunia pesantren, gonjangan ini dimulai dengan adanya konsep "link and match" dan "pesantren unggulan" yang telah merambah

¹⁴ Philip S Gorski, *Mann's Theory of Ideological Powers: Sources, Applications and Elaborations*, h. 103-104

¹⁵ Jacqueline B Mondros dan Scott M Wilson, 1994, *Organizing for Power and Empowerment*, New York: Columbia University Press, h. 216



dalam dunia pendidikan. Pendidikan model ini bermula dari ideologi pembangunanisme yang dianut oleh Rezim Orde Baru, dimana seluruh aktivitas masyarakat, organisasi sosial, organisasi keagamaan, politik dan dunia pendidikan diorientasikan untuk pembangunan tanpa melihat hakekat ideologi yang berada di balik pembangunan itu sendiri.¹⁶ Kapitalisasi sebagai ruh pendidikan Barat, bagi dunia pesantren tidak hanya ditafsirkan, didekonstruksi, pun diberikan adanya keleluasan menjadikannya dengan wajah baru kapitalisme.

C. Dinamika Pondok Pesantren Dalam Transformasi Masyarakat Dan Politik

Keruntuhan Orde Baru menyeret pola-pola relasi sosial yang mengejutkan, fantastis, tidak terduga dalam masyarakat. Pada masyarakat Lombok hubungan tuan guru dan santri muncul relasi patronase dalam bingkai politik semakin menguat. Keterlibatan beberapa tuan guru dalam ranah politik praktis menciptakan tarik-menarik antara idealisme kerakyatan dan pragmatisme politik. Ketercapaian (tepatnya proses) demokrasi menjadi ekspektasi yang kuat pada masyarakat Lombok. Keberpihakan tuan guru terhadap persoalan-persoalan masyarakat menjadikan harapan ini tidak bisa dipungkiri akan memberikan porsi yang besar terhadap tuan guru untuk tampil sebagai pemimpin daerah di Lombok. Pemilu tahun 1999 banyak menempatkan tuan guru sebagai pemimpin daerah baik pada tingkat gubernur, walikota dan bupati serta DPRD.

¹⁶ Mansour Fakih, 1981, "Ideologi... h.xi



Ekspektasi ini terlihat dengan jelas dalam porsi keterwakilan tuan guru sebagai wakil rakyat di Lombok, Harapan ini masih tetap besar pada Pemilu 2004 yang menempatkan partai keagamaan (PKB dan PPP) menempati teratas. Pada titik ini tuan guru yang merupakan tokoh agama dan pemimpin pondok pesantren masih menjadi tumpuan harapan bagi perubahan politik di Lombok. Tuntutan masyarakat menempatkan maksimalisasi peran yang seharusnya ditunjukkan oleh para politisi.

Dalam studi-studi sosial tentang manajemen strategi pondok pesantren berbasis politik dan budaya di Indonesia menunjukkan bahwa peranan pimpinan pondok yaitu kyai atau tuan guru adalah tokoh yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam sosial kemasyarakatan. Posisi sentral mereka terkait dengan kedudukannya sebagai orang yang terdidik, berilmu di tengah masyarakat. Sebagai elit terdidik kyai atau tuan guru juga seringkali memberikan pengetahuan tentang agama Islam kepada masyarakat dan pesantren. Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional merupakan sarana penting untuk melakukan transfer of knowledge atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat umumnya. Di sisi lain para kyai atau tuan guru menjadi patron, bagi masyarakat dalam kedudukan politik dalam pemilihan, baik dari pemilihan kepada desa, bupati bahkan sampai ke tingkat gubernur politik masyarakat bergantung kepada pendapat kyai atau tuan guru. Posisi sentral kyai atau tuan guru dapat di lihat dalam pola patronasi atau ketergantungannya dalam masyarakat. Peran



serta kyai atau guru sebagai pemimpin pondok pesantren dalam tranformasi sosial (social transformation) sangatlah penting karena dalam konteks sosial kyai dipandang sebagai seorang yang dipercaya dan disegani dalam masyarakat. Kyai atau tuan yang merupakan pimpinan pondok pesantren merupakan sektor kepemimpinan Islam yang dianggap paling dominan selamanya berabad-abad kyai telah memainkan peranan yang menentukan dalam proses perkembangan sosial (social), kultur (culture), keagamaan (religion) dan pendidikan (education) dalam periode sekarang pun kyai atau tuan guru telah mewujudkan vitalitasnya dalam kepemimpinan Islam.

Perubahan dalam masyarakat terus mengalami peningkatan baik dari peningkatan masyarakat itu sendiri atau bahkan pada perubahan yang negatif oleh karena itu, masyarakat sebagai orang yang butuh motivasi dan bimbingan (guidence) serta pemahaman tentang bidang-bidang aqidah, syari'ah, ahlak, pergaulan, kebudayaan, dan dakwah dari seorang tokoh agama yakni kyai atau tuan guru. Dinamika dan kiprah kyai atau tuan guru dalam ranah sosial sangat memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat dan fenomena yang telah terjadi merupakan sebuah fakta sosial bahwa kyai atau tuan guru yang merupakan pimpinan pondok pesantren memiliki peranan yang cukup luas kyai tidak hanya cukup berkiprah dalam bidang agama saja, tetapi juga mencakup bidang sosial dan politik.



Dalam konteks ini pesantren memiliki banyak peran, sebagai lembaga pendidikan, politik, sekaligus penyaring globalisasi. Peran dengan multi talenta ini mengharuskan tuan guru memiliki "banyak wajah" bagi pemberdayaan. Peran ini berbeda dengan apa yang disebut oleh Geertz, tuan guru sebagai "makelar budaya",¹⁷ sebagai elit ia menunjukkan sebagai *organizer* masyarakat yang memiliki kepekaan terhadap persoalan keagamaan, sosial kemasyarakatan, politik bahkan ekonomi serta keruwetan globalisasi dengan membuat strategi lain yang lebih bumi dan memberdayakan bagi masyarakat.

Tuan guru sebagai *organizer* pesantren memiliki kekuatan gerak (*driving force*) dalam komunitas. Menurut Alinsky bahwa *organiser adalah orang yang memiliki imajinasi tinggi dan kreatif dan perekayasa dalam komunitas, pembawa visi perubahan yang sesuai dengan kenyataan, tidak mengikat pada basis geografis dan kontituen*. Namun hal ini dikritik oleh Aronovitz bahwa definisi dan sugesti tersebut akan mengandung potensi kontrol dan penghasutan komunitas (*demagoguery*) serta implikasi negatif. Mondros dan Wilson¹⁸ menyetujui pendapat bahwa *organiser memiliki potensi aktor dalam organisasi dan orang yang pantas dalam pencarian organisasi (investigation)*. Seorang *organiser* memiliki keterampilan dan karekteristik yang terekam dalam tiga kriteria, atribusi visi

¹⁷ Abdurahman Wahid, "Benarkah Kiyai Membawa Perubahan Sosial?: Sebuah Pengantar" dalam Hiroko Horikosi, 1987, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, xvi

¹⁸ Jacqueline B Mondros dan Scott M Wilson, *Organizing for Power and Empowerment*, (New York: Columbia University Press 1994), h. 11



perubahan (*change vision attributes*), keterampilan teknis (*technical skills*), keterampilan interaksional (*interactional skill*).¹⁹

Visi perubahan (*change vision*) dimaksudkan bagaimana seorang organiser memiliki orientasi dalam perubahan dan visi bagi masyarakat marginal dan tradisional (*the odds they face*). Seorang organiser hendaknya mampu menghidupkan yang tergantung kepada kekuatan dedikasi dan komitmen. Visi seorang organiser merupakan perpaduan antara keras kepala (*doggedness*), dedikasi (*dedication*), dan disiplin. Dalam konteks ini pesantren menjadi bagian dari organiser yang kreatif dalam perubahan sosial.²⁰ Pada titik ini agen dalam pesantren menjadi memiliki visi perubahan komunitas dan lingkungan masyarakat.

Peran yang dimainkan pesantren ditengah-tengah masyarakat bukan hanya merupakan lembaga pendidikan islam saja, akan tetapi pondok pesantren juga merupakan sentral politik dan budaya yang dimainkan oleh pimpinan pesantren tersebut, sebab kyai atau tuan guru bukan hanya sebagai pemimpin di lembaga pondok pesantren yang ia bina tapi kyai atau tuan guru juga merupakan naungan masyarakat dalam budaya dan politik. Dalam konteks ini pesantren terlibat dalam konflik dan ketegangan yang tidak pernah habis oleh situasi dan kondisi, karena perkembangan masyarakat dan dunia global yang senantiasa bergerak cepat, sehingga pesantren seringkali menciptakan identitas pesantren tidak lagi se-

¹⁹ Jacqueline B Mondros dan Scott M Wilson, *Organizing...*, h. 19-27

²⁰ Hiroko Horikosi, 1987, *Kyai...*



mata-mata di dalam gabungan komunitas namun diciptakan oleh realitas. Pada titik ini terjadi dialektika antara identitas yang dikonstruksi komunitas dengan realitas yang melingkupi sehingga menciptakan konstruksi identitas baru dalam dunia pesantren.

Identitas pesantren ini tergambar dalam ideologi di tengah arus globalisasi. Ideologi ini menjadi bagian dari gerak pesantren sebagai kiblat bagi kekuatan dan kekurangan dalam realitas sosial masyarakat.

D. Penutup

Manajemen strategis di pondok pesantren adalah keputusan dan tindakan manajerial terkait dengan kinerja jangka panjang dipondok pesantren. Manajemen strategis mencakup semua fungsi dasar manajemen, yaitu mulai dari merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengendalikan strategi dalam suatu lembaga pendidikan di pondok pesantren. Manajemen strategis berperan penting dalam meningkatkan kinerja di pondok pesantren. Melalui strategi yang terancang dengan baik, lembaga pendidikan di pondok pesantren dapat meningkatkan mutu pendidikan berbasis budaya dan politik dengan memperkuat, dapat menciptakan keunggulan kompetitif dibidang pendidikan, bidang ilmu sosial kemasyarakatan, sehingga dapat meningkatkan kemajuan dan kemakmuran bukan hanya pada pesantren tersebut tapi pada masyarakat di sekitarnya.



Daftar Pustaka

- Barton, Greg, 2006, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: LKiS
- Dwipayana, AAGN Ari dan Krisdiyatmoko, 2006, *Pembangunan Yang Meminggirkan Desa*, Yogyakarta: IRE.
- Fakih, Mansour, 1981, "Ideologi dalam Pendidikan" dalam William F O'neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gorski, Philip S, Mann's Theory of Ideological Powers: Sources, Applications and Elaborations, h. 103-104
- Hasan, Fuad, "Kebudayaan, Teknologi dan Teknokrasi" dalam Agus R Harjono, 1999, *Pembebasan Budaya-Budaya Kita*, Jakarta: Gramedia,
- Hidayati, Tatik, 2002, *Pendidikan dalam Perspektif Islam Tradisional Seyyed Hossein Nasr: Telaah Kritis terhadap Tujuan dan Kurikulum Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Tesis PPS UIN Sunan Kalijaga,
- Kartasasmita, Ginanjar, Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat, dalam Agus R Harjono, 1999, *Pembebasan Budaya-Budaya Kita*, Jakarta: Gramedia
- Mondros, Jacqueline B dan Scott M Wilson, 1994, *Organizing for Power and Empowerment*, New York: Columbia University Press,



- Muhammad Iwan Fitriani, *Manajemen Pendidikan Islam (geneologi, paradigma dan model alternatif pengembangannya),(Mataram : Sanabila, 2015)*
- Paulo Freire, 1993, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: LP3ES,
- Raharjo, Dawam, 2006, “Pengantar Edisi Indonesia: Krisis Kapitalisme Global: Ilusi atau Realitas” dalam George Soros, 2006, *Open Society Reforming Global Capitalism*, Jakarta: YOI,
- Shiddiqi, Nourouzzaman, 1975, *The Role of The Ulama’ During The Japanese Occupation of Indonesia (1942–1945)*, Canada: McGill University,
- Sidiq, Mahfudz, 1996/1997, *Kompetensi Dasar Pendidikan Anak–Anak Kyai Pengasuh PondokPesantren di Lombok*, Jember: Universitas Jember,
- Soros, George, 2006, *Open Society: Reforming Global Capitalism*, Jakarta: YOI
- Suprpto, *Dialektika Islam dan Budaya Nusantara dari negosiasi, adaptasi hingga komodifikasi, (Jakarta , Kencana 2020)*
- Wahid, Abdurahman, “Benarkah tuan guru Membawa Perubahan Sosial?: Sebuah Pengantar” dalam Hiroko Horikosi, 1987, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M,
- Wahid, Abdurahman, 1983/1984, *Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta: CV Dharma Bhakti,
- Wahid, Marzuki 2005, “Ma’had Aly: Nestapa Tradisionalisme dan Tradisi Akademik yang Hilang” dalam *Jurnal Istiaro’ Volume*



04, Nomor 01 Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama
Islam Direktorat Jenderal Kelemagaan Agama Islam
Departemen Agama Republik Indonesia

